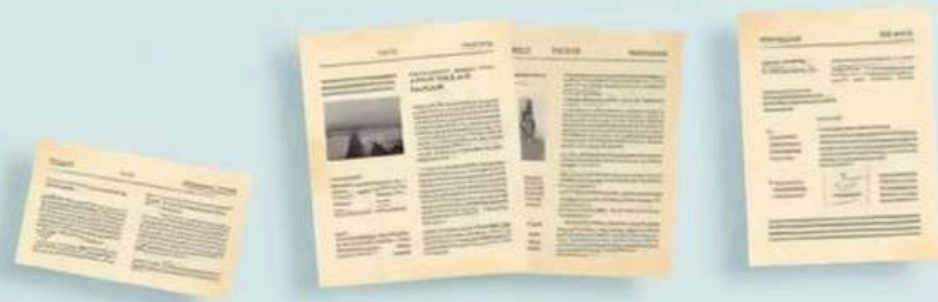


JENIS-JENIS ANGGARAN SEKTOR PUBLIK

Kelompok 5

PUBLIC SECTOR BUDGETING



Perkembangan Anggaran Sektor Publik

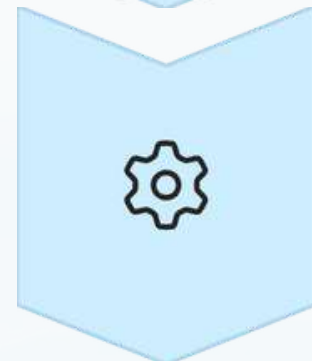
Sistem anggaran sektor publik terus berkembang seiring dinamika paradigma administrasi publik, kebutuhan masyarakat, dan tuntutan globalisasi. Perubahan ini didorong oleh kelemahan pendekatan lama dan tuntutan akuntabilitas publik yang tinggi.

Dari Tradisional ke Modern



Anggaran Tradisional

Fokus pada rincian pos belanja (line-item) tanpa memperhatikan hasil.



New Public Management (NPM)

Menekankan efisiensi, orientasi hasil, dan desentralisasi.



Anggaran Kinerja

Menghubungkan dana dengan capaian hasil melalui prinsip value for money.

Budgeting Systems



1900 : Traditional Budgeting

1970 : Zero-Based Budgeting



2023





Sistem Anggaran Lanjutan



Zero Based Budgeting (ZBB)

Disusun dari nol, memperbaiki kelemahan incremental budgeting.



Planning, Programming, and Budgeting System (PPBS)

Mengintegrasikan perencanaan, pemrograman, dan anggaran.



Good Governance

Transparansi, partisipasi, akuntabilitas (UU No. 17 Tahun 2003).

Perkembangan ini menunjukkan pergeseran paradigma dari orientasi input menuju output, outcome, dan akuntabilitas publik.

Jenis-Jenis Anggaran Sektor Publik: Anggaran Tradisional

Anggaran tradisional menekankan pada input atau masukan, mengalokasikan dana per pos pengeluaran tanpa memperhatikan hasil atau kinerja.

Incrementalism

Menambah/mengurangi item anggaran berdasarkan data tahun sebelumnya tanpa kajian mendalam.

Line-Item

Rincian anggaran berdasarkan jenis belanja, fokus pada input.

Sentralis

Penyusunan dan pengendalian terpusat, membatasi fleksibilitas unit pelaksana.

Spesifikasi & Tahunan

Alokasi dana spesifik, terperinci, dan disusun untuk satu tahun anggaran.

Anggaran Bruto

Membukukan seluruh penerimaan dan pengeluaran secara penuh untuk transparansi.

Anggaran New Public Management (NPM)

Anggaran berbasis NPM mengadopsi praktik manajemen swasta ke sektor publik, menekankan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.



Orientasi Hasil

Fokus pada output dan outcome program.



Desentralisasi Kewenangan

Fleksibilitas unit pelaksana dalam mengelola anggaran.



Kepuasan Masyarakat

Layanan publik berkualitas dengan standar terukur.



Akuntabilitas Kinerja

Unit kerja bertanggung jawab atas hasil yang dicapai.



Efisiensi & Efektivitas

Penggunaan sumber daya hemat biaya dan optimal.



Adopsi Praktik Swasta

Menggunakan prinsip pengelolaan modern.

Anggaran Kinerja

Anggaran kinerja disusun dengan menekankan keterkaitan antara dana yang dialokasikan dengan hasil (output) yang ingin dicapai, berorientasi pada kinerja dan efektivitas.



Orientasi Output & Outcome

Menekankan hasil dan manfaat yang dicapai.



Indikator Kinerja

Program/kegiatan diukur dengan indikator jelas.



Value for Money

Ekonomi, efisiensi, dan efektivitas penggunaan anggaran.



Fleksibilitas

Kebebasan unit kerja dalam mengelola dana.



Akuntabilitas Kuat

Setiap rupiah dipertanggungjawabkan melalui laporan kinerja.

Zero Based Budgeting (ZBB)

ZBB mengharuskan setiap unit kerja membuat perencanaan anggaran dari awal (nol), mempertimbangkan kebutuhan dan prioritas program, bukan melanjutkan anggaran tahun sebelumnya.

Berangkat dari Nol
Setiap periode anggaran disusun dari awal.

Mendorong Efisiensi
Menekan potensi pemborosan.



Justifikasi Kegiatan

Semua program harus dijustifikasi ulang.

Orientasi Prioritas

Kegiatan penting didanai lebih dulu.

Evaluasi Mendalam

Analisis efektivitas dan efisiensi.



Planning, Programming, and Budgeting System (PPBS)

PPBS mengintegrasikan perencanaan, penyusunan program, dan penganggaran secara terpadu untuk menyelaraskan anggaran dengan tujuan jangka panjang.

Fokus Tujuan & Aktivitas Anggaran berpusat pada pencapaian tujuan.	Implikasi Anggaran Masa Depan Mempertimbangkan dampak anggaran tahun mendatang.	Analisis Sistematis Menggunakan analisis biaya-manfaat untuk alternatif program.
--	---	--

Kelebihan & Kelemahan Anggaran Tradisional dan NPM



Anggaran Tradisional

- Kelebihan

Sederhana, mudah diawasi, stabil, disiplin anggaran.

- Kelemahan

Fokus input, inkrementalisme, sentralis, lambat.

Anggaran NPM

- Kelebihan

Orientasi hasil, efisiensi, akuntabilitas, fleksibilitas, kualitas layanan.

- Kelemahan

Biaya tinggi, kompleks, potensi konflik kepentingan.



Kelebihan & Kelemahan Anggaran Kinerja, ZBB, dan PPBS

Anggaran Kinerja

- Kelebihan

Terkait kinerja, value for money, akuntabilitas, fleksibilitas.

- Kelemahan

Sulit indikator, sistem informasi, SDM tinggi.

ZBB

- Kelebihan

Rasional, efisiensi, alokasi dana baru, akuntabilitas.

- Kelemahan

Rumit, SDM kompeten, biaya tinggi, kurang cocok jangka panjang.

PPBS

- Kelebihan

Integrasi perencanaan, program jelas, rasional, minim pemborosan.

- Kelemahan

Data detail, tenaga ahli, mahal, kurang fleksibel.

Studi Kasus

Sejak tahun 2015, pemerintah Indonesia mengalokasikan dana desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mempercepat pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dana ini jumlahnya terus meningkat setiap tahun, dari Rp 20,7 triliun pada tahun 2015 hingga mencapai lebih dari Rp 70 triliun per tahun setelah 2019.

Pada awal pelaksanaannya, sistem pengelolaan dana desa masih menggunakan pendekatan yang menyerupai anggaran tradisional. Desa hanya menerima alokasi dana dengan rincian pos belanja tertentu, seperti pembangunan infrastruktur desa, operasional pemerintah desa, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, kelemahannya adalah dana seringkali digunakan tanpa analisis kebutuhan yang mendalam, sehingga beberapa program tidak tepat sasaran atau tumpang tindih dengan program pemerintah daerah.

Seiring perkembangannya, pemerintah kemudian mendorong penerapan anggaran berbasis kinerja dalam pengelolaan dana desa. Misalnya, program padat karya tunai diwajibkan menunjukkan output yang jelas, seperti berapa kilometer jalan desa yang dibangun, berapa rumah tangga yang mendapat manfaat, dan berapa jumlah tenaga kerja lokal yang terserap. Dengan demikian, dana yang digelontorkan tidak hanya tercatat sebagai belanja, tetapi juga bisa diukur kinerjanya.

Namun, implementasi dana desa masih menghadapi banyak tantangan. Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) beberapa kali menemukan adanya penyimpangan, mulai dari ketidaksesuaian penggunaan dana, lemahnya administrasi, hingga kasus korupsi oleh aparat desa. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sistem anggaran berbasis kinerja sudah diterapkan, faktor sumber daya manusia, pengawasan, dan transparansi tetap menjadi kunci keberhasilan (Mardiasmo, 2018).

Pertanyaan Studi Kasus:

1. Mengapa pengelolaan dana desa pada awalnya cenderung menyerupai sistem anggaran tradisional?
15
2. Bagaimana penerapan anggaran berbasis kinerja dapat memperbaiki efektivitas Dana Desa?
3. Apa saja tantangan utama yang menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana desa?
4. Menurut pendapatmu, langkah apa yang seharusnya dilakukan pemerintah agar dana desa lebih transparan, akuntabel, dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat desa?